

Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Pembangunan Ekonomi

Meriza Elpha Darnia¹⁾, Lola Melan Sihombing²⁾, Vivian³⁾ Putri⁴⁾, Rasita Dewi⁵⁾, Anastasya Hutasoit⁶⁾, Agustri Afrianto Sitompul⁷⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id,

Vivianputriiii18@gmail.com, agustri.sitompull2@gmail.com, anastasyahutasoit87@gmail.com,
rasitadewi233@gmail.com, lolamelansihombing@gmail.com

ABSTRAK

Melalui Omnibus Law, Lembaga Penjamin Investasi diharapkan menjadi terobosan dalam mengatasi permasalahan investasi di Indonesia. Investasi asing memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perubahan dalam undang-undang investasi, seperti Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, menyediakan insentif dan jaminan bagi investor. Hal ini penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Indonesia harus terus berupaya membangun iklim usaha yang kondusif melalui peran aktif pemerintah dan perubahan positif dalam regulasi investasi. Lembaga Penjamin Investasi memiliki peran dalam mengatur keuangan di investasi, tetapi tantangan dalam pelaksanaan perlu diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Lembaga Penjamin Investasi masih memerlukan perbaikan, termasuk dukungan perlindungan hukum yang lebih kuat dan kejelasan sistem hukum. Dalam rangka mengoptimalkan potensi Indonesia dalam menghadapi persaingan global, penting untuk memperbaiki peraturan investasi, menguatkan perlindungan hukum, dan menciptakan iklim usaha yang lebih menarik bagi investor. Dengan demikian, Indonesia dapat berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara serta memperkuat daya tariknya bagi para penanam modal.

Kata Kunci : Lembaga Penjamin Investasi, Pemerintah, Investasi

ABSTRACT

Through the Omnibus Law, the Investment Guarantee Agency is expected to be a breakthrough in addressing investment issues in Indonesia. Foreign investment plays a crucial role in economic growth. Changes in investment laws, such as Law Number 25 of 2007 on Investment, provide incentives and guarantees for investors. This is essential for economic growth and national development. Indonesia must continue its efforts to create a conducive business environment through active government involvement and positive changes in investment regulations. This research employs a normative legal research method by examining literature. The results of the study indicate that the effectiveness of the Investment Guarantee Agency still requires improvement, including stronger legal protection and legal system clarity. To maximize Indonesia's potential in facing global competition, it is important to enhance investment regulations, strengthen legal protection, and create a more attractive business environment for investors. Thus, Indonesia can make a more significant contribution to economic growth and national development and enhance its appeal to potential investors.

Keywords : Indonesia Investment Authorit, Government, Investment

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang, terus berupaya mendorong investasi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Investasi adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi monopoli pasar. Semua ini sejalan dengan visi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik

Indonesia, yang menegaskan tekad masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan melalui kebebasan berkehidupan sebagai bangsa merdeka.

Penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi elemen penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Keterlibatan investor asing dalam pembangunan ekonomi telah membuktikan manfaatnya dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan neraca pembayaran negara. Namun, untuk menjalankan investasinya, para investor memerlukan perlindungan hukum dan kepastian.

Pemerintah Indonesia telah mengambil serius langkah-langkah untuk memfasilitasi investasi, yang tercermin dalam regulasi yang ada. Beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang dapat menciptakan landasan hukum bagi penanaman modal. Namun, perlindungan hukum bagi investor asing bukan hanya tentang peraturan perundang-undangan. Ini juga melibatkan penyelenggaraan perekonomian nasional yang efisien dan berkelanjutan.

Investasi adalah salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu negara, dan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, baik melalui investasi asing maupun dalam negeri (Yuliana, 2010). Oleh karena itu, tugas negara sangat penting dalam mengatur investasi agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ini disebabkan oleh kompleksitas investasi yang melibatkan banyak aspek, seperti permasalahan pertanahan, tenaga kerja, permodalan, perpajakan, dan berbagai aspek lainnya.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal, dan bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi saat ini (Keuangan, 2016). Dengan adanya Undang-Undang tentang Penanaman Modal ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah investasi, meningkatkan kepastian hukum, dan menyediakan insentif bagi investor. Hal ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan investasi baik dari dalam negeri maupun asing, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan yang mendukung investasi sebagai sarana untuk memajukan perekonomian. Dengan mengatur investasi dengan baik, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran negara dan regulasi yang mendukung investasi adalah bagian integral dalam mewujudkan visi pembangunan ekonomi Indonesia. Penanam modal asing yang ingin berinvestasi di Indonesia harus melalui berbagai tahap evaluasi atau kelayakan investasi. Ini mencakup perencanaan bisnis yang harus sesuai dengan peraturan yang ada di negara tersebut, serta memahami tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam menjalankan usaha di dalam negeri. Perlindungan hukum dan kepastian menjadi faktor penting dalam membuat investasi ini menjadi kenyataan.

Kepastian hukum adalah salah satu modal terbesar untuk mendatangkan penanaman modal asing ke suatu negara. Investor ingin tahu bahwa bisnis mereka akan mendapatkan perlindungan yang memadai dan kepastian hukum yang diperlukan untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjamin kepastian hukum sangat penting.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja, yang sering dikenal sebagai Omnibus Law. Omnibus Law ini berfokus pada penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha, yang seharusnya membantu meningkatkan kepastian hukum bagi investor.

Salah satu aspek penting dari Omnibus Law adalah pendirian Lembaga Penjamin Investasi (LPI). LPI adalah lembaga independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan bertujuan untuk memberikan jaminan dan insentif kepada investor. Harta LPI dimasukkan ke dalam Harta Negara, yang merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan integritas. Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu memiliki lembaga penjamin investasi, dan hal ini telah membantu mereka dalam memikat investor.

Selain itu, beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Filipina, telah mengadopsi pendekatan serupa dengan Omnibus Law. Mereka telah berhasil meningkatkan investasi melalui kebijakan yang memberikan kemudahan izin, kebebasan pajak, dan insentif kepada investor. Di sinilah pentingnya kerjasama antara investor asing dan negara penerima modal, yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, penting bagi pemerintah untuk mengarahkan peran investor ke prioritas pembangunan. Ini melibatkan perencanaan yang matang, kebijakan pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang ketat. Dengan pendekatan ini, investasi dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas (Ria, 2019).

Dalam konteks ini, hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal menjadi sangat penting. Investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya jika mereka melihat adanya fasilitas dan jaminan yang memadai dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan infrastruktur, peraturan, dan lingkungan usaha yang mendukung investasi. Dengan begitu, investor akan merasa aman dan yakin bahwa modal mereka akan menghasilkan keuntungan.

Pentingnya perlindungan hukum bagi investor asing dalam pembangunan ekonomi adalah tentang menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjamin kepastian hukum. Hal ini tidak hanya menguntungkan investor asing, tetapi juga menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia, seperti mengeluarkan Omnibus Law dan mendirikan LPI, diharapkan bahwa investasi asing akan terus meningkat, memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi negara, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor.

METODE

Dalam mengkaji aspek hukum investasi, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder yang melibatkan penelusuran peraturan-peraturan, literatur-literatur, dan aspek hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan hukum investasi dan Lembaga Penjamin Investasi (LPI) sebagai sumber lembaga penjamin para investor dalam melakukan investasi sehingga menaruh kepercayaan saat melakukan investasi. Penelitian ini memiliki karakteristik penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada dalam konteks hukum investasi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yang fokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam investasi.

Selain itu, untuk mendukung pendekatan perundang-undangan tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis (analytical approach) untuk memahami implikasi dari peraturan-peraturan tersebut terhadap praktik investasi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat aspek hukum investasi secara lebih mendalam dan kritis. Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan, pusat dokumentasi, media cetak, dan media elektronik. Sumber data yang diidentifikasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Hukum Primer, yaitu sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat masyarakat dan berkaitan langsung dengan hukum investasi. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modalz
2. Sumber Hukum Sekunder, yang mencakup bahan-bahan yang memberikan informasi atau pembahasan terkait dengan isi sumber primer dan implementasinya.
3. Sumber Hukum Tertier, yang merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau panduan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan hukum investasi di Indonesia. Melalui metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemangku kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami kompleksitas hukum investasi dalam konteks hukum Indonesia yang terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. INVESTASI

Investasi adalah konsep yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi, baik dalam bentuk modal asing maupun dalam negeri, memiliki potensi besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Karena kompleksitasnya, negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur investasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti peraturan tanah, tenaga kerja, permodalan, dan perpajakan. Tidak mengherankan bahwa Indonesia telah menerapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Keuangan, 2016) sebagai upaya untuk mendorong investasi.

Pentingnya investasi dalam konteks pembangunan ekonomi nasional telah diakui oleh para ahli dan peneliti, seperti Yuliana pada tahun 2010. Investasi dianggap sebagai kunci untuk mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, baik dengan modal dari dalam negeri maupun investasi asing (Fitria, 2016) dan (Nagel, 2020). Penelitian hukum mengenai investasi memerlukan pendekatan yang tepat. Penelitian normatif adalah salah satu metode yang digunakan dalam menggali hukum investasi. Dalam metode penelitian ini, peneliti mengandalkan bahan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan perbandingan hukum. Ini adalah pendekatan yang memungkinkan analisis hukum yang mendalam (Benuf & Azhar, 2020).

Dalam konteks investasi, penting untuk memahami berbagai elemen yang mempengaruhi keputusan investor. Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada keputusan investor, termasuk faktor politik, ekonomi, dan hukum. Faktor politik memiliki dampak besar pada investasi. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah memainkan peran kunci dalam menentukan apakah investor akan memasukkan modalnya ke dalam suatu negara. Investor mencari kepastian bahwa

investasi mereka tidak akan terpengaruh oleh perubahan rezim politik atau ketidakstabilan politik yang dapat merugikan investasi mereka.

Faktor ekonomi juga merupakan pertimbangan penting. Investor ingin melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan GDP, stabilitas mata uang, dan tingkat inflasi dapat memengaruhi keputusan investasi. Namun, faktor hukum mungkin yang paling krusial dalam menarik investasi. Investasi memerlukan kepastian hukum yang kuat. Investor ingin tahu bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dilindungi, serta bahwa peraturan hukum tidak akan berubah secara tiba-tiba. Hal ini menciptakan suasana investasi yang menarik yang mencerminkan kejelasan, kestabilan, dan prediktabilitas dalam hukum investasi. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengimplementasikan undang-undang penanaman modal yang mengatur kebijakan investasi. Undang-undang ini menciptakan lingkungan yang ramah investasi dengan memberikan perlindungan hukum, mengatur pajak dan insentif, serta mempromosikan kepastian hukum dan kestabilan. Pentingnya undang-undang penanaman modal yang kondusif juga dapat dilihat dari pendekatan perundang undangan yang digunakan dalam penelitian normatif. Kejelasan dan stabilitas hukum adalah hal penting dalam menarik investasi. Undang-undang investasi yang baik harus mempromosikan kepastian hukum, meminimalkan ketidakpastian, dan menghilangkan diskresi yang dapat merugikan investor.

Faktor-faktor yang memengaruhi investasi adalah hasil dari siklus penanaman modal yang kompleks. Siklus ini mencakup faktor politik, ekonomi, dan hukum yang saling berhubungan. Kestabilan politik menciptakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya menarik investor. Hukum yang baik dan kepastian hukum adalah faktor kunci yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

Dalam konteks ini, peraturan pemerintah berperan penting. Peraturan yang kondusif adalah yang menciptakan fasilitas bagi investor, memberikan kepastian, dan menghilangkan ketidakpastian. Kunci dalam menghasilkan peraturan yang kondusif adalah kejelasan, kestabilan, dan transparansi. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia adalah salah satu contoh undang-undang yang menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum, mengatur insentif, dan menciptakan kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi investor.

Keseluruhan, investasi adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor politik, ekonomi, dan hukum saling berhubungan dan mempengaruhi keputusan investor. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki undang-undang penanaman modal yang kondusif dan ramah investor. Ini akan menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pembangunan nasional.

B. TINJAUAN HUKUM MENGENAI HUKUM INVESTASI

Hukum investasi adalah bidang yang sangat penting dalam menarik investasi, terutama investasi asing, di Indonesia. Saat ini, Indonesia menghadapi persaingan yang semakin meningkat dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk investor. Oleh karena itu, menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah suatu keharusan.

Perlunya memahami bahwa kestabilan makroekonomi dan kepastian hukum adalah dua pilar utama dalam membangun iklim usaha yang kondusif. Keadaan makroekonomi yang stabil menciptakan kepercayaan bagi investor, sementara kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak-hak investor akan diakui dan dilindungi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memprioritaskan kedua hal ini. Pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menarik investasi. Mereka harus bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait untuk

menciptakan lingkungan yang ramah investor. Hal ini mencakup memfasilitasi proses perizinan, memberikan layanan yang efisien, dan memastikan bahwa investor dapat menjalankan bisnis mereka dengan lancar (Barbara, 2008).

Selain itu, perubahan dalam hukum investasi juga menjadi aspek penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 memiliki peran sentral dalam hal ini. Undang-Undang ini menawarkan berbagai insentif, pelayanan, dan jaminan bagi investor. Terdapat banyak materi dalam Undang-Undang ini yang mengatur fasilitas dan jaminan bagi para investor. Perubahan dalam undang-undang investasi bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi investasi. Ini menjadi sangat penting karena investasi memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan menciptakan kepastian hukum dan memberikan insentif yang menarik, diharapkan banyak investor akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia (David, 2008). Oleh karena itu, dalam menghadapi persaingan global yang semakin meningkat, Indonesia harus terus berupaya membangun iklim usaha yang kondusif. Ini melibatkan peran aktif pemerintah pusat dan daerah, serta perubahan positif dalam regulasi investasi. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih menarik bagi investor, dan ini akan memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Investasi merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan dengan pendekatan yang tepat terhadap hukum investasi, Indonesia dapat mengoptimalkan potensinya dalam menghadapi persaingan global.

C. PERSEBARAN INVESTASI PENANAMAN MODAL

Persebaran investasi penanaman modal adalah strategi yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara. Sejumlah langkah strategis telah diambil untuk menjalankan peran penting ini:

- a) Menumbuhkan Pusat-Pusat Ekonomi Terbaru: Salah satu pendekatan untuk meratakan investasi adalah dengan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi di luar Pulau Jawa. Ini mencakup pengembangan di bidang-bidang strategis yang sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah tertentu. Dengan demikian, investasi tidak hanya terpusat di satu lokasi, seperti Jakarta, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang kurang berkembang.
- b) Penyebaran Fasilitas dan Insentif: Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas, insentif, dan kemudahan diberikan kepada para penanam modal yang ingin mengembangkan proyek di daerah. Dengan memberikan dorongan ekonomi ini, investor lebih mungkin tertarik untuk berinvestasi di luar pusat-pusat ekonomi yang sudah mapan.
- c) Energi Terbarukan: Menciptakan sumber energi baru dan terbarukan adalah langkah penting untuk mendukung pemerataan investasi. Terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi dalam sektor energi terbarukan, investasi dalam energi ini dapat membawa manfaat ganda, yaitu memenuhi kebutuhan energi lokal dan menarik investasi ke wilayah tersebut.
- d) Pertumbuhan Pusat-Pusat Wilayah Strategis: Pusat-pusat wilayah strategis dapat mencakup pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia. Ini adalah langkah untuk memfokuskan investasi di kawasan-kawasan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat.
- e) Peningkatan Infrastruktur: Infrastruktur yang kuat adalah kunci untuk menopang pertumbuhan investasi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan infrastruktur

di wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau melalui berbagai strategi penanaman modal di sektor-sektor yang dianggap memiliki potensi.

- f) Persebaran investasi penanaman modal adalah cara untuk menghindari konsentrasi investasi di satu wilayah dan memastikan manfaat ekonomi lebih merata di seluruh negeri. Dengan melakukan berbagai langkah strategis ini, Indonesia dapat menciptakan peluang bagi investor untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, serta mendukung pemerataan pembangunan. Upaya ini memainkan peran penting dalam memajukan negara dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Investasi yang merata dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah-daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

D. PERTUMBUHAN SEKTOR PANGAN, ENERGI DAN INFRASTRUKTUR

Dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh negeri, terdapat beberapa sektor kunci yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pertumbuhan di sektor pangan, energi, dan infrastruktur memegang peran penting dalam mewujudkan tujuan ini. Berikut adalah langkah-langkah dan strategi untuk mendorong pertumbuhan di sektor-sektor tersebut (Hilda, 2014) :

1. Pertumbuhan di Bidang Pangan:

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan sektor pangan. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, permintaan akan pangan juga mengalami peningkatan signifikan (Neni, 2000). Oleh karena itu, penting untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pertumbuhan di bidang pangan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang semakin meningkat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong pertumbuhan di sektor pangan:

- **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:** Salah satu langkah pertama yang harus diambil adalah meningkatkan produksi tanaman pangan dalam jumlah besar. Hal ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki lahan yang luas dan subur. Dengan merencanakan pengembangan pertanian di wilayah-wilayah ini, pertumbuhan ekonomi dapat didorong, dan petani kecil dapat mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Peningkatan produksi tanaman pangan juga akan membantu dalam menjaga ketahanan pangan negara. Dengan produksi yang cukup, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan makanan, yang saat ini masih tinggi.

- **Dukungan kepada Petani Kecil:** Petani kecil memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan pangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan kepada mereka. Dukungan ini dapat berupa fasilitas, dana, dan insentif kepada penanam modal yang berusaha mempromosikan pertanian dan meningkatkan fasilitas pasca-panen serta infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian. Petani kecil perlu diberdayakan dengan penyediaan pelatihan, teknologi pertanian, dan akses yang lebih baik ke pasar. Ini akan membantu mereka meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya, mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor pangan.

- **Pengembangan Klaster Industri:** Selain produksi tanaman pangan, penting untuk mengembangkan klaster industri yang berhubungan dengan pangan di daerah-daerah yang memiliki potensi. Daerah-daerah ini mungkin memiliki keunggulan alamiah dalam produksi

makanan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menarik pengembangan klaster industri pangan ke daerah-daerah tersebut. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa dana, kemudahan status lahan, dan insentif lainnya kepada investor yang bersedia berinvestasi dalam pengembangan klaster industri pangan di daerah-daerah tersebut. Ini akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

- Penelitian dan Promosi: Investasi dalam penelitian dan promosi produk pangan Indonesia sangat penting. Penelitian dapat membantu dalam pengembangan produk pangan unggulan yang dapat bersaing di pasar internasional. Dalam hal promosi, citra produk pangan Indonesia perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Pemerintah, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, dapat berinvestasi dalam penelitian pertanian untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pangan. Promosi produk pangan Indonesia juga perlu dilakukan secara agresif di tingkat nasional dan internasional.

Pertumbuhan di bidang pangan adalah salah satu langkah penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan ketahanan pangan. Dengan meningkatkan produksi, memberikan dukungan kepada petani kecil, mengembangkan klaster industri, melakukan penelitian, dan mempromosikan produk pangan Indonesia, Indonesia dapat menjadi pemain utama di pasar pangan global. Langkah-langkah ini harus didukung oleh pemerintah (Amalia, 2017).

2. Pertumbuhan di Bidang Energi :

Energi adalah tulang punggung pembangunan ekonomi modern. Sebagian besar sektor ekonomi bergantung pada pasokan energi yang stabil dan terjangkau untuk operasi sehari-hari. Oleh karena itu, pertumbuhan di bidang energi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia (Vidya, 2019). Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong pertumbuhan di sektor energi:

- Penggunaan Energi Terbarukan: Salah satu langkah utama dalam mendukung pertumbuhan di sektor energi adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan dan berkelanjutan. Ini mencakup energi matahari, angin, air, dan biomassa. Indonesia memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam terbarukan ini. Dengan menginvestasikan lebih banyak dalam energi terbarukan, Indonesia dapat mencapai efisiensi, merawat alam, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Hal ini akan membantu menjaga lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- Pengurangan Ketergantungan pada Energi Fosil: Salah satu tantangan besar adalah mengurangi ketergantungan pada energi fosil, terutama minyak bumi dan batu bara. Energi fosil tidak hanya berkontribusi pada masalah lingkungan seperti perubahan iklim, tetapi juga membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Dalam mengurangi ketergantungan ini, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan energi terbarukan dan mengurangi subsidi energi fosil. Ini mungkin termasuk penerapan pajak karbon, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, dan pengaturan insentif untuk perusahaan yang berinvestasi di sektor energi terbarukan.

- Peningkatan Efisiensi Energi: Peningkatan efisiensi penggunaan energi adalah langkah lain yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan di sektor energi. Dengan meningkatkan efisiensi, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari setiap unit energi yang dihasilkan. Ini akan mengurangi biaya operasional bagi bisnis dan rumah tangga, serta mengurangi dampak lingkungan. Program efisiensi energi dapat mencakup pengadaan peralatan yang lebih efisien, penggunaan teknologi canggih, dan promosi perilaku hemat energi. Pemerintah perlu

mendukung inisiatif-inisiatif ini dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi praktik efisiensi energi.

Pertumbuhan di bidang energi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, meningkatkan efisiensi energi, menerapkan pendekatan terpadu, dan mendorong penelitian dan inovasi, Indonesia dapat mencapai tujuannya dalam menciptakan sektor energi yang kuat dan berkelanjutan. Semua langkah ini harus didukung oleh pemerintah, perusahaan energi, dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Pertumbuhan Bidang Infrastruktur

Infrastruktur memainkan peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Dengan infrastruktur yang kuat dan berkualitas, Indonesia dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendukung kelancaran penanaman modal, serta memungkinkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Pertumbuhan di bidang infrastruktur mencakup sejumlah inisiatif penting yang bertujuan memperbaiki dan memperluas infrastruktur yang ada serta membangun infrastruktur baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang beberapa aspek pertumbuhan di bidang infrastruktur:

1) Memanfaatkan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur yang Ada

Salah satu langkah pertama dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia adalah memanfaatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang sudah ada. Hal ini mencakup pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan infrastruktur yang telah ada agar dapat digunakan secara lebih efisien. Misalnya, jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan rel kereta api yang ada perlu dipelihara dan ditingkatkan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Bandara yang lebih baik dan lebih modern akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke daerah-daerah wisata, yang pada gilirannya akan mendukung industri pariwisata.

2) Peningkatan dan Perluasan Infrastruktur

Selain memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, Indonesia juga perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur baru. Hal ini melibatkan perluasan dan pembangunan fasilitas baru di sejumlah sektor, seperti transportasi, energi, air, dan sanitasi. Di bidang transportasi, perluasan jaringan jalan raya dan pembangunan jalan tol baru menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur di sektor energi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam pembangkit listrik tenaga terbarukan dan pengembangan infrastruktur distribusi listrik akan membantu memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, yang perlu dimanfaatkan secara maksimal.

3) Penyatuan Pembangunan Infrastruktur

Penting untuk mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia agar sesuai dengan keunggulan daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Ini melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa investasi dilakukan dengan efisien dan efektif, serta sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang.

4) Mempercepat Pembangunan di Daerah yang Belum Berkembang

Salah satu tantangan utama adalah mempercepat pembangunan di daerah yang masih tertinggal. Hal ini mencakup daerah pedesaan dan terpencil yang seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar. Pemerintah perlu fokus pada investasi di daerah-daerah ini

untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Investasi di daerah yang belum berkembang mencakup pembangunan jaringan jalan dan transportasi lokal, penyediaan air bersih, pengembangan listrik pedesaan, dan peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.

4. Peran Pemerintah dalam Pertumbuhan Investasi

Peran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan investasi sangat penting dan memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim investasi di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, faktor pemerintah memiliki pengaruh besar dalam menarik investasi, baik domestik maupun asing. Beberapa langkah dan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan investasi adalah sebagai berikut:

a) Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi pemerintahan antara tingkat pusat dan daerah merupakan faktor kunci dalam mendukung investasi. Pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam hal ini, koordinasi ini mencakup penentuan kebijakan investasi yang seragam dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

b) Sumber Daya Manusia

Profesionalitas aparatur pemerintah daerah sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan investasi. Hal ini mencakup kemampuan dalam melaksanakan tugas, komitmen terhadap kualitas kerja, dan dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para investor.

c) Kebijakan Investasi

Pemerintah perlu merumuskan dan melaksanakan kebijakan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup kebijakan yang memberikan insentif kepada investor, baik berupa insentif fiskal maupun non-fiskal. Insentif seperti pembebasan pajak, kemudahan perizinan, dan jaminan kepastian berusaha akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

d) Pemberdayaan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan investasi. Pemerintah daerah perlu diberdayakan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan investasi, seperti memberikan perizinan, pengawasan, dan fasilitasi investasi. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada pemerintah daerah agar dapat melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik.

e) Penyederhanaan Perizinan

Salah satu hambatan utama dalam investasi adalah birokrasi yang rumit dan perizinan yang sulit. Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk membuatnya lebih efisien dan mudah. Penyederhanaan perizinan akan mempercepat proses investasi dan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

f) Perlindungan Hukum

Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada para investor. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, sistem peradilan yang independen, dan perlindungan terhadap hak-hak investor. Perlindungan hukum yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap lingkungan investasi di Indonesia.

g) Kepatuhan Terhadap Standar Internasional

Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi di Indonesia mematuhi standar internasional dalam hal hak asasi manusia, lingkungan, dan tata kelola yang baik. Kepatuhan ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai tujuan investasi yang bertanggung jawab.

Faktor pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia. Melalui koordinasi, kebijakan investasi yang mendukung, kemitraan dengan sektor swasta, promosi investasi, dan berbagai upaya lainnya, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan komitmen dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang semakin menarik.

E. LEMBAGA PENJAMIN INVESTASI (LPI)

Indonesia Investment Authority (INA), yang dikenal juga sebagai Lembaga Penjamin Investasi (LPI), adalah sebuah entitas yang telah berperan penting dalam lanskap keuangan global. Dalam beberapa tahun terakhir, LPI telah muncul sebagai pemain kuat di pasar ekonomi global. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran, fungsi, tujuan, serta modal yang dikelola oleh LPI. Lebih lanjut, kita juga akan membahas peran pentingnya dalam mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia (Sri, 2006).

1) Peran Penting Sovereign Wealth Funds (SWF) atau LPI

SWF, seperti INA, memainkan peran yang signifikan dalam mengelola dana investasi suatu negara. Contohnya, ketika perusahaan investasi asal Cina membeli \$3 miliar dalam ekuitas saham non-voting di Blackstone Group, ini menandai pertumbuhan peran SWF dalam skema keuangan global. SWF, dari berbagai negara Asia dan Teluk Persia, juga telah mengambil peran penyelamat dalam krisis perbankan global dengan pembelian saham senilai \$60 miliar di bank Eropa dan Amerika ketika krisis kredit perumahan terjadi. SWF berperan penting dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, ada juga wacana negatif seputar SWF. Pertama, ketika dana yang dikelola oleh SWF sangat besar, ini dapat memiliki dampak besar terhadap pasar keuangan global. Keberadaan pemerintahan asing dalam perusahaan-perusahaan lokal juga menjadi isu. Banyak yang khawatir bahwa ini dapat menimbulkan masalah keamanan dan kenyamanan nasional. Selain itu, informasi tentang kinerja SWF sering kali tidak transparan, yang dapat menyebabkan keraguan. Namun, terdapat pengecualian, seperti Government Pension Fund of Norway, yang transparan dalam pengelolaan dana.

2) Pembentukan LPI (INA) di Indonesia

Lembaga Penjamin Investasi, atau INA, mungkin masih asing di telinga sebagian orang. Lembaga ini baru saja disahkan bersamaan dengan undang-undang cipta kerja dan dikenal secara internasional sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF). LPI merupakan lembaga yang bertugas mengelola dana investasi negara, dan ini merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. LPI diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020.

Kewenangan ini mencakup penyusunan dana yang akan diinvestasikan dalam instrumen keuangan, pengelolaan aset investasi, kerjasama dengan pihak lain, mencari mitra untuk penanaman modal, memberi dan menerima pinjaman, serta mengelola aset. LPI memiliki tujuan untuk memaksimalkan penanaman modal demi memajukan kegiatan ekonomi yang

berkelanjutan. Fungsinya mencakup pengelolaan investasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi investasi. Organ LPI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Dewan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direktur LPI, sementara Dewan Direktur bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengurusan operasional LPI. LPI bertanggung jawab kepada Presiden.

3) Modal LPI

Modal awal LPI disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2020, dan berjumlah 75 triliun rupiah. Modal ini dapat bersumber dari berbagai aset, termasuk uang tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, serta saham milik negara. Dana yang diberikan kepada LPI dapat berasal dari pemberian dana negara dan sumber lainnya. LPI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, tetapi dapat memiliki kantor di luar Jakarta dan bahkan di luar wilayah Indonesia. LPI berfungsi mengelola penanaman modal dalam rangka memajukan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

4) Peran LPI dalam Pertumbuhan Investasi

Saat ini, pertumbuhan investasi di Indonesia sangat penting. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penanaman modal. Pembentukan LPI merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Dengan hadirnya LPI, pemerintah dapat mengelola dana investasi dengan lebih efisien dan profesional. Ini dapat meningkatkan minat investor dan membantu mencapai visi Indonesia 2045 sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.

5) Kerja Sama dengan Uni Emirat Arab (UEA)

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke UEA membawa berita baik. Selain komitmen penanaman modal sebesar \$22.8 miliar, Indonesia juga membahas kerja sama dengan UEA terkait Sovereign Wealth Fund (LPI). Ini adalah langkah penting dalam mengelola dana penanaman modal dari berbagai negara. Keberadaan LPI akan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, LPI (INA) adalah lembaga penting yang memainkan peran strategis dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan pengelolaan dana investasi yang efisien dan profesional, LPI diharapkan dapat membantu mencapai tujuan ekonomi nasional dan memaksimalkan nilai penanaman modal demi kesejahteraan masyarakat.

F. SIMPULAN DAN SARAN

Indonesia Investment Authority (INA), yang juga dikenal sebagai Lembaga Penjamin Investasi (LPI), adalah lembaga yang muncul sebagai pemain penting dalam lanskap keuangan global. Peran Sovereign Wealth Funds (SWF) dalam mendukung ekonomi global semakin terlihat, dan INA merupakan contoh sukses bagaimana suatu negara dapat mengelola dana investasi dengan efisien.

Namun, ada berbagai pandangan terhadap SWF dan INA. Di satu sisi, mereka memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Namun, ada kekhawatiran terkait dengan skala dana yang dikelola oleh SWF yang dapat mempengaruhi pasar keuangan global. Keberadaan pemerintah asing dalam perusahaan lokal juga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan nasional. Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana investasi

menjadi kunci untuk mengatasi kekhawatiran tersebut.

Dalam konteks Indonesia, LPI adalah langkah yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Indonesia telah melihat peningkatan signifikan dalam penanaman modal, dan dengan hadirnya LPI, pengelolaan dana investasi negara menjadi lebih efisien dan profesional. Ini dapat membantu meningkatkan minat investor dan mendukung visi Indonesia 2045 sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.

Untuk memastikan peran positif LPI terus berlanjut, berikut adalah beberapa saran:

- a) Keterbukaan dan Transparansi: Penting bagi LPI untuk menjaga tingkat keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana investasinya. Ini akan membantu mengatasi kekhawatiran terkait dan membangun kepercayaan baik dalam negeri maupun internasional.
- b) Pengelolaan Profesional: Memastikan bahwa LPI dijalankan dengan manajemen profesional dan independen adalah langkah penting. Kualitas pengelolaan akan memengaruhi hasil investasi dan keberlanjutan jangka panjang.
- c) Kemitraan Investasi: LPI dapat mencari kemitraan dengan lembaga investasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini dapat membantu dalam diversifikasi portofolio investasi dan mencapai hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Barbara, Evalina. “Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” Universitas Sumatera Utara, 2008.
- David G. and Bernhard Eschweiler, 2008, *Sovereign Wealth Funds: A Bottom-Up Primer*, New York, JP Morgan Research. 2008
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, CV INDHILL Co, Jakarta, 2008
- Jeswald W. Salacuse, *The Three Laws of International Investment: National, Contractual, and International Frameworks for Foreign Capital*, London: Oxford University Press, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia* Jakarta : UI Press, 1974
- Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif v. Pembatasan* Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia, 2008
- Amanda Perry, “An Ideal Legal System for Attracting Foreign Direct Investment? Some Theory and Reality”, *American University International Law Review*, 2000
- Bortolotti, B., Fotak, V., Megginson, W., dan Miracky, W., 2009, *Sofereign Wealth Fund Investment Patterns and Performance*, website: <http://facultystaff.ou.edu/M/William.L.Megginson-1 Fernandez>,
- Evalina Barbara, Tesis: *Pemberian Hak Atas Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008
- Amalia Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Universitas Yudharta Pasuruan, Parsuruan, 2017
- Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Jakarta, 2014

-
- Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti, Perlindungan Hukum terhadap Investor dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar, Jurnal Unisba, Bandung, 2000
- Vidya Noor Rachmani, Perlindungan Hukum Bagi investor dalam Pasar Modal menurut Undang- Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Pena Justisia, volume 18, 2019
- Ria Sintha Devi, Perlindungan Hukum bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di indonesia, JurnalRectum, Volume 1 : No. 2, 2019
- Sri Purwaningsih, Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Dalam Penanaman Modall Asing, JurnalIlmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, volume 3 : No. 2, 2006
- https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=N8K0Pp5GiMwC&oi=fnd&pg=PP2&dq=sovereign+wealth+funds&ots=Lep1EygDhT&sig=PU_udGoKz9ulbEogyI_mnwBYVmc&redir_esc=y#v=onepage&q=sovereign%20wealth%20funds&f=false